

POLITIK KEKUASAAN PENGHULU DI RIAU: KASUS DOSAN, SIAK¹

Khairul Anwar², Syafri Harto, dan Syofian Hadi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau,
E-mail:khairulanwar147@yahoo.com

ABSTRACT

Since the enactment of the decentralization policy in 1999, the Regional Government and local communities were given the room to change the naming of the village into the village. Implementation of this policy in Siak done by applying Regional Regulation No. 1 of 2015. The main implementer of these policies at the village level is the prince. This study aims to find the political attitude of the prince of the power and its implications for social conflict management strategy in the watershed Siak. The method used qualitative methods. Interactive methods which include data collection, data display, data verification, and withdrawal kesimpulan. Hasil the study found that there is a lot of interest identified villages that decision kepengambilan access, agricultural inputs, output markets, the prince socialization experiences since childhood and that in the end that characterizes why Dosan village headman tolerans being conservative and compromise in managing conflict Siak river basin.

Key words; Political power, leadership, tolerance, conflict

¹ Bahan jurnal adalah publikasi hasil penelitian Unggulan Universitas Riau 2016

² Khairul Anwar, Erman dan Syofian Hadi adalah staf pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau, 2016

I. PENDAHULUAN

Secara politik, Kampung Dosan termasuk wilayah yang relatif baru dibentuk yaitu sewaktu Kabupaten Siak berdiri tahun 2001³. Namun secara historis kampung Dosan sudah ada sejak masa Kerajaan Siak Sri Indrapura dan atau masa penjajahan kolonial Belanda. Dalam tahun 2015, karena Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memungkinkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak menginisiasi penggantian nomenklatur Desa menjadi Kampung⁴ dengan tujuan menghidupkan kembali politik kesimbangan di kampung yang berbasis system kekerabatan dan pemerintahan formal.

Kampung Dosan ini terletak di muara daerah aliran sungai (DAS) Siak. Sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi ,tatakelola sektor publik dan korporasi di Indonesia muncul fenomena menarik untuk diamati lebih dalam di Kampung Dosan yaitu semakin maraknya kapitalisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan menguatnya kekuasaan formal elit penghulu kampung dalam situasi konflik. Studi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Riau (2000), CiFOR (2015) menunjukkan bahwa sudah terjadi sekitar 1320 konflik sosial berbasis lahan perkebunan dan 650 konflik diantaranya adalah konflik antara perusahaan dan masyarakat dalam konteks hubungan kapitalisasi dan kekuasaan lokal.

Secara factual, di kampung Dosan konflik terjadi dalam kasus penyerbuan warga Kampung Paluh, Benayah terhadap kapal yang berlayar di sungai siak tahun 2005, demonstrasi masyarakat DAS Siak ke Pemda, (Riau

Pos,7 Juni 2010.), demonstrasi warga Kampung Benayah, Dosan, Teluk Mesjid, Dusun Pusaka kekantor Bupati Siak menuntut pembagian lahan perkebunan kelapa sawit, tahun 2010 (Riau Pos, September 2010), dan protes tokoh masyarakat Desa Paluh, Benteng Hilir atas dampak banjir yang diduga kuat akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit .

Nampak dari fakta itu bahwa konflik semakin banyak, intensitasnya semakin meluas, masyarakat dan elit kampung Dosan semakin kritis menentang kebijakan pemerintah. Pengamatan awal menimbulkan dugaan bahwa konflik ini berkaitan dengan sikap politik komunitas penghulu kampung tentang kekuasaan dalam mengimplementasikan kebijakan publik mengenai perkebunan kelapa sawit. Sebab tipologi sikap politik elit terhadap kekuasaan berimplikasi kepada dinamika konflik aktor pasca reformasi di tengah masyarakat. Usulan penelitian ini bertujuan menemukan tipologi sikap politik kepala kampung terhadap kekuasaan dalam situasi konflik di kampung Dosan 2014-2015.

Dalam riset ini, konflik sosial di kampung Dosan DAS Siak tahun 2014-2016 dijadikan fokus kajian karena beberapa pertimbangan. Kampung Dosan dijadikan areal penelitian karena wilayah kampung ini berada di DAS Siak yang paling dinamik. Sebagai desa tradisional yang dekat pusat pemerintahan, menjadi pintu masuk Riau setelah Batam masuk provinsi Kepulauan Riau. Kemudian kampung ini pusat pertambangan minyak di DAS Siak, industri Buton dan jauh sebelumnya telah menjadi pusat perubahan masyarakat di sekitar DAS Siak. Semula, masyarakat ketiga desa ini bermata pencaharian nelayan. Perubahan lingkungan DAS yang kurang menguntungkan masyarakat

⁴ Pemkab Siak mengeluarkan Perda no.5 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung dan Perda No.2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat

setempat (misalnya pencemaran), membuat penduduk desa ini beralih menjadi petani pekebun. Sejak pembangunan perkebunan dimulai 2005, konflik antar masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan PEMDA, Masyarakat dengan perusahaan, Perusahaan dengan PEMDA cenderung meningkat. Konflik sosial ini harus dikelola agar tidak meluas ke sektor kehidupan strategis lainnya.

Kedua, tahun 2001 di Siak menjadi daerah otonom diantara 16 wilayah pemekaran wilayah di Riau. Pemekaran wilayah ini yang terbanyak di Indonesia. Bersamaan proses pemekaran tersebut terjadi pergeseran wewenang pengelolaan sumber daya alam, yang semula didominasi pemerintah pusat, sejak 2001 banyak banyak dialihkan ke pemerintah daerah. Lemahnya aparat birokrasi akibat kekurangan informasi dan banyaknya aktor politik berorientasi pragmatis atau bahkan "oportunis" membuat munculnya kebijakan perkebunan yang cenderung menguntungkan bisnis swasta besar. Ini kemudian mendorong terjadinya ketegangan politik di wilayah perkebunan Riau. Ketiga hal diatas menunjukkan pentingnya mempelajari sikap politik kelompok inti sosial di DAS Siak sebagai isu politik lokal dan memberi alasan kuat bagi studi ini.

Selain itu, sejalan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Riau yaitu mengembangkan kajian dan penelitian konflik lahan di DAS di provinsi Riau dan pola ilmiah pokok universitas Riau pengembangan sumberdaya kawasan dan perairan berbasis sains dan teknologi maka sejak tahun 2001, penulis sudah melakukan beberapa penelitian terkait konflik politik lokal era desentralisasi. Beberapa penelitian itu belum menyentuh konflik sosial-politik di

daerah DAS terutama DAS Siak. Pada hal, sekitar 80% wilayah provinsi Riau terdiri dari DAS. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan lebih jauh sebagai upaya mensinergikan kebijakan pembangunan daerah Riau dengan penelitian unggulan Universitas Riau selaras RIP yang dibuat. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini bermanfaat dalam mendorong perubahan sosial-politik masyarakat Riau melalui perbaikan kebijakan ke depan.

Berdasarkan latar sosio-politik diatas, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan pokok penelitian adalah sepertiapakah pola politik kekuasaan penghulu kampung Dosan dan apa implikasinya dalam mengelola konflik sosial di DAS Siak 2014-2016? Pertanyaan ini dapat dirumuskan lebih spesifik, yaitu; (1) Apa tujuan dan preferensi penghulu kampung Dosan dalam mengelola konflik DAS? Apa sarana dan prasarana yang dipakai penghulu Dosan? Bagaimana penghulu kampung mengorganisir gagasannya ke dalam kelompok masyarakat?, dan apa implikasinya kepada pilihan strategi pengelolaan konflik sosial di DAS Siak? Untuk lebih memudahkan memahami sikap politik penghulu kampung Dosan digunakan suatu pendekatan atau model tertentu. Salah satu model untuk mengidentifikasi sikap politik elit kampung dan proses politik yang berkaitan dengan kebijakan perkebunan kelapa sawit di Dosan adalah konsep "power" dan "political-economy".

Cara pandang riset ini dilakukan berlandaskan konseptualisasi yang diajukan oleh Laswell dan Kaplan (2000) dan Haryanto (2015). Menurut para ilmuwan ini Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi merupakan terminology yang sulit dipisahkan satu dengan yang lainnya. Menurut Haryanto

bahwa kewenangan pada hakekatnya adalah kekuasaan. Akan tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Diantara keduanya, mempunyai pengertian yang berbeda satu dengan yang lainnya, namun sulit untuk dipisahkan. Selanjutnya Haryanto menyatakan bahwa kewenangan dan kekuasaan dibedakan dalam keabsahannya. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan, sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Hal ini senada dengan pendapat Laswell dan Kaplan. Ilmuwan ini menyatakan bahwa wewenang (*authority*) merupakan kekuasaan formal (*formal power*). Aktor yang memiliki wewenang dianggapnya berhak mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.

Dalam menganalisis sikap politik penghulu digunakan pendekatan *Modrn Political Economy* yang memuat empat langkah: *pertama*, merumuskan dan berusaha memahami makna pendapat, cara pandang, penilaian aktor penghulu kampung sebagai tokoh kunci tentang situasi konflik yang terjadi di kampung Dosan. Bersamaan itu, dilakukan *chekck*, *recheck* dan *crosscheck* kepada kerabat terdekat penghulu baik sebagai pemimpin formal maupun informal yakni terkait sikap politik terhadap kekuasaan lokal. Langkah ini mengasumsikan para aktor adalah individu atau institusi yang berupaya memaksimalkan utilitas, dan melakukan perhitungan keuntungan dan kerugian sebaik-baiknya dalam mencapai suatu tujuan. Karena perbedaan sumberdaya, konflik muncul

dalam proses pencapaian tujuan itu. Aktor-aktor tersebut baik yang berasal pemerintah kampung, tokoh-tokoh adat dan kerabat terdekat penghulu kampung menurut garis keturunan. *Kedua*, merumuskan preferensi masing-masing aktor mengenai pilihan kebijakan perkebunan kelapa sawit yang dikonflikkan di Siak. Data yang dianalisis meliputi penerapan pola; Kemitraan Pemda-rakyat, PBS, PBN, Perkebunan Rakyat, dan Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Dalam memilih pola-pola perkebunan tersebut para aktor diasumsikan menghadapi pertimbangan-pertimbangan paling tidak empat isu utama, yaitu; pertanahan, lapangan kerja, teknologi, dan lingkungan. Dalam menganalisis data tersebut para aktor digambarkan sebagai pihak yang suka pada pola yang dapat memaksimalkan keuntungannya. Sehingga dari analisis ini diketahui apa sikap politik penghulu, reksioner, konservatif, radikal, dan reformis..

Ketiga, mengidentifikasi bagaimana penghulu kampung bekerjasama dalam mencapai tujuan pengelolaan konflik. Koalisi ini dilakukan dalam rangka konsolidasi dan memperkuat daya tawar terhadap kelompok lain. Data yang analisis meliputi bagaimana penghulu mengompromikan kepentingannya dengan aktor atau kelompok lainnya. Kompromi aktor ini diasumsikan untuk mendapatkan dukungan dalam memperkuat koalisi. Selain itu, akan di analisis juga koalisi yang dibangun penghulu dan kerabatnya dan legitimasi masyarakat kampung Dosan. Dalam analisis ini akan diperoleh bentuk-bentuk sikap politik penghulu terhadap kekuasaan dan menjelaskan bagaimana pergeseran kekuasaan di kampung.

II. KAJIAN PUSTAKA

Dalam bagian ini hendak diuraikan karya-karya yang relevan dan menjadi sumber inspirasi bagi penelitian. Uraian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai apa yang telah diketahui oleh para peneliti terdahulu mengenai persoalan harmonisasi kebijakan perkebunan

Robert H. Bates⁵ (1981) melakukan penelitian mengenai kaitan antara proses kebijakan dengan krisis pertanian di Afrika. Untuk menjelaskan itu, Bates melakukan analisis terhadap para pembuat keputusan dengan menerapkan asumsi bahwa kebijakan publik itu adalah akibat dari pergulatan politik antar aktor. Analisis Bates menunjukkan kaitan antara kebijakan pertanian yang dibuat oleh pemerintah di Afrika dengan dinamika hubungan antar kelompok kepentingan dalam arena politik. Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan pertanian merupakan hasil interaksi politik antara pemerintah dan produsen perkotaan. Untuk konteks Indonesia, gambaran oleh Bates diatas sejalan dengan uraian para peneliti lainnya, salah satu contohnya adalah karya Andrew MacIntyre.

Studi MacIntyre (199) ini relevan untuk dibicarakan demi mempertajam kerangka analisis yang diajukan Bates. Studi ini, pada dasarnya bertumpu pada eksplanasi "*interest-group politics*". MacIntyre meneliti politik persaingan antar-kelompok di Indonesia pada masa Orde baru yang

menekankan interaksi antar kelompok dalam memformulasikan kebijakan. Dalam studi ini, MacIntyre mengembangkan konsep "*Bureaucratic Pluralism*" dari Donald Emmerson dan "*Restricted Pluralism*" dari R. William Liddle. Menurut para ilmuwan politik pluralis ini, perpolitikan Orde baru tidak sepenuhnya "solid" dan "tertutup". Dalam birokrasi masa otoriter itu masih dimungkinkan adanya pluralism kepentingan politik. Emmerson menyebut fenomena ini sebagai "*bureaucratic pluralism*" (MacIntyre, 1991). Kedua, proses pembuatan keputusan waktu itu juga tidak kedap pengaruh dari luar birokrasi, yaitu pengaruh dari para aktor non-negara. Dalam sektor-sektor kebijakan yang secara politik dianggap tidak strategis, yaitu tidak menyangkut isu keamanan nasional dan isu politik tingkat tinggi lainnya, proses pembuatan kebijakan itu bisa mentolerir pengaruh dari luar. Studi Emmerson mengenai proyek industri di Sumatera, pengkajian Liddle mengenai kebijakan pertanian beras dan gula, dan penelitian MacIntyre mengenai kebijakan pemerintah dalam regulasi industri tekstil, farmasi dan jasa asuransi, yaitu sektor-sektor penting dalam ekonomi tetapi tidak menyentuh isu politik-keamanan, menunjukkan bahwa perpolitikan Orde baru cukup pluralistik. Beberapa kelompok kepentingan bisa memengaruhi hasil akhir proses kebijakan publik. Dinamika perpolitikan kelompok itu tercermin dalam proses kebijakan itu. Hasil akhir proses kebijakan itu tidak hanya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. Liddle menyebut fenomena ini sebagai "*restricted pluralism*". Berlangsung perpolitikan yang pluralis, tidak sekadar manolitik, tetapi terbatas hanya dalam sektor-sektor yang non-

⁵ Studi Bates (1981) ini sekaligus menjadi inspirasi penulis dalam melakukan penelitian disertasi.

Penelitian yang dilakukan Bates (1981) adalah studi yang terbaik dalam tradisi teori aktor rasional yang diterapkan di negara-negara berkembang. Lihat Malarangeng (2004).

politik dan non-keamanan (MacIntyre,1991: 16-18).

Studi ekonomi-politik lainnya yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit dilakukan oleh Anne Casson . Hasil penelitian Casson (2000) menunjukkan bahwa Kelapa sawit merupakan salah satu subsektor pertanian yang paling dinamis di Indonesia. Pertumbuhan kelapa sawit yang pesat ini didorong oleh faktor kebijakan ekonomi pemerintahan Soeharto. Studi yang terkait politik lokal, dilakukan oleh Vedi R. Hadiz (2002) mengenai bangkitnya politik lokal kasus Sumatera Utara pasca runtuhnya Orde Baru.

Berbagai studi di atas pada dasarnya memfokuskan diri pada isu harmonisasi kebijakan. Perbedaan diantara studi diatas, yaitu Bates (1981) menekankan pada kebijakan pertanian, MacIntyre (1991 dan Liddle (1991) menekankan bahwa proses pembuatan keputusan tidak kedap dari pengaruh luar birokrasi, Casson (2000) lebih memperhatikan kebijakan masa transisi rezim, Hadiz (2002) memfokuskan diri pada proses kebijakan politik lokal. Kajian-kajian itu banyak membahas formulasi kebijakan masa ORBA dan menekankan sisi untung-rugi ekonomis.

Metode

III. METODE ANALISIS

Dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis penelitian ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah : Pertama, identifikasi kondisi konflik dan perpolitikan Siak, sejarah pemerintah kampung di Siak, berbagai ketentuan adat yang diimplementasikan di Siak. Sumber data skunder diperoleh dari bahan dokumen baik dicetak maupun elektronik. Sumber data skunder ini adalah laporan penelitian, jurnal-buku, peraturan perundangan dan dokumen tertulis konsep-konsep

kekerabatan kampung baik berupa Undang-undang, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah yang Mengatur tentang lahan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Siak, Surat Kabar Riau Pos, Peta Lokasi, Brosur, Selebaran, Risalah Rapat, Badan Pusat Statistik (BPS), dan bahan yang bersumber dari websites in-ternet.

Selanjutnya, kedua, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan penghulu kampung Dosan terkait sejarah kelembagaan Kepenghuluaan dan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM). Tujuan wawancara itu adalah: (1), untuk mmengungkapkan pandangan,pandangan penghulu sebagai representasi masyarakatnya terhadap pilihan kebijakan perkebunan; (2), untuk mengumpulkan data lebih lengkap mengenai posisi penghulu sebagai pimpinan formal maupun sebagai pemimpin informal di Dosan, dan (3), untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana penghulu mengorganisir diri dan berkoalisi dengan kelompok sosialn lain. Sebelum mewawancara penghulu terlebih dahulu disusun peta system kekerabatan di kampung dosan. Secara umum kajian ini membagi aktor pemerintah dan non-pemerintah beberapa aktor kampung; Dosan, aktor-aktor pemerrintah (formal) dimenjadikan penguatan informasimasi utama dari penghulu atau cakupan observasi. Demikian tokoh-tokoh adat (informal) dijadikan sebagai penguat informasi yang diperoleh dari wawancara dengan penghulu.

Alasan mengapa Kampung Dosan DAS ini ditunjuk adalah: *pertama*, Dosan memiliki kecendrungan tingkat konflik DAS yang tinggi pasca Otonomi Daerah di Riau. *Kedua*, Dosan adalah kampung modern-tradisional pinggiran sungai Siak yang sedang mengalami perubahan sosial yang cepat

setelah OTDA. *Ketiga*, Dosan adalah termasuk area penerapan kebijakan perkebunan paling intensif dan ekstensif baik pola PTPN, Perkebunan Swasta, PIR, dan Kemitraan Pemda Siak-masyarakat. Selain itu, data primer diperoleh juga melalui observasi langsung dengan membuat kunjungan lapangan kepada peristiwa yang terkait isu kebijakan kelapa sawit. Tujuan observasi ini adalah untuk memotret kondisi lingkungan politik yang relevan dan memuat karakteristik kampung. Dalam observasi ini data diperoleh berupa: foto, selebaran, catatan, naskah orasi atau pidato aktor, pesan spanduk.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Politik Kekuasaan Penghulu

Dalam sejarah pergulatan politik elit di Riau ada dinamika terutama yang paling dinamis misalnya dalam kaitan isu baru yang berkaitan dengan kebijakan perkebunan kelapa sawit. Dalam konteks ini, gagasan mengenai kebun sawit pada masa orde baru tidak mungkin ditolak, karena didukung pemerintah pusat. Dalam politik otoriter tidak mungkin ada penolakan. Tetapi setelah era reformasi, lalu munculah penolakan terhadap kebijakan pusat. Salah satu kebijakan pusat itu adalah kebijakan perkebunan Kelapa sawit. Kemudian sejak tahun 1999 perkebunan kelapa sawit menjadi isu politik baru, dan bisa dipakai oleh aktor-aktor yang bersaing di Riau termasuk penghulu Dosan.

Dalam era pergulatan elit tersebut persoalan kekecewaan terhadap akses ke SDA terus mewarnai beberapa kelompok-kelompok masyarakat termasuk di kampung Dosan. Meskipun tidak semua kelompok yang kecewa, masih ada kelompok yang mendapatkan keuntungan. Konteks masyarakat yang demikian akan mewarnai politik kekuasaan penghulu kampung dalam

memilih strategi pengelolaan konflik di DAS Siak. Adapun sikap penghulu kampung mempertahankan kepentingan masyarakat kampung yang berimplikasi kepada strategi kendali konflik DAS diuraikan sebagai berikut:

1. Akses Kepengambilan Keputusan.

Luas wilayah Kampung Dosan adalah 10.028 Km secara geografis berupa daratan 573 Ha daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Penduduk Kampung Dosan berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Suku Melayu Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong-royong dalam proses pengambilan keputusannya sudah menjadi suatu kearifan kampung. Menurut informan tradisi pengambilan keputusan ini sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya kampung Dosan dan hal inilah secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat di kampung Dosan⁶.

⁶ Lihat Profil Kampung Dosan 2016. Pada tahun 1925 Desa Dosan dipimpin oleh Datuk Lego. Pada saat itu jumlah KK bertambah menjadi 60 KK. Pada saat pemerintahannya penghulu lebar mendirikan sebuah mesjid yang tanpa nama berdinding tasak ataubambu. Habis masa jabatan penghulu Legan pada tahun 1951 yang diserahkan pada Tuk Montel. Pada zaman kepemimpinannya ia meninggalkan sebidang lahan yang di pergunakan untuk lapangan bola kaki yang sampai saat ini masih dipergunakan oleh masyarakat desa Dosan.

Kepemimpinan Datuk Montel berakhir pada tahun 1963. Langsung diserahkan jabatannya kepada Abdullah Ayim dengan jumlah penduduk sekitar 80 KK. Untuk mempermudah pekerjaannya, Abdullah Ayim mengangkat seorang tokoh masyarakat Desa Dosan untuk menjadi pegawainya yang disebut dengan RT, yang bernama Abdul Rahman. Setelah menjadi pegawai desa, Abdurrahman menemukan sebuah danau yang jaraknya 70 km dari Sungai Siak yang di beri nama Danau Naga Sakti. Masa kepemimpinan Abdul Ayim, ia mendirikan

Dengan kata lain, sikap toleransi yang dipraktikkan penghulu sebagai pemimpin kampung banyak mewarnai terhadap pilihan strategi konflik yang dipilih. Pertanyaannya mengapa penghulu bersikap komformis dalam memutuskan sesuatu kepentingan terutama terkait SDA di kampung Dosan? Pertanyaan ini menghendaki gambaran latar sosial-politik masyarakat kampung Dosan.

Kampung Dosan mempunyai jumlah penduduk 1.327 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 689 jiwa, perempuan 623 orang dan 366 KK, yang terbagi dalam 3 (Tiga) wilayah dusun, yaitu Dusun I, Dusun II dan Dusun III. Pembentukan Dusun, Rukun kampung, Rukun Tetangga ditetapkan dengan Peraturan Penghulu. Dari berbagai ciri khas pemerintah kampung tersebut terdapat kesamaan-kesamaan institusi-institusi politik pemerintahan di seluruh lingkup pemerintahan yang melekat dalam Undang-Undang Nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa atau Peraturan Pemerintah Nomor.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang. Nomor.6 tahun 2014 tentang Desa. Kesamaan institusi itu terintegrasi dalam wewenang yang ada pada penghulu⁷.

sebuah masjid yang bernama Masjid Al-Fallah yang sekarang dipergunakan untuk balai pertemuan desa. Setelah pembangunan masjid selesai di bangun, sebuah kantor desa yang sekarang dipergunakan untuk kantor BPD dan UED SP

⁷ Adapun berbagai wewenang tersebut adalah Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (a) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; (b) Memegang kekuasaan Pengelolaan keuangan dan asset Desa; (c) Menetapkan peraturan Desa; (d) Menetapkan Anggaran dan Belanja Desa; (e) Membina kehidupan masyarakat Desa; (f) Membina keamanan dan ketertiban masyarakat Desa; (g) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai

Adapun ruang lingkup kewenangan penghulu terdapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kewenangan formal ini mengindikasikan masuknya system nasional ke dalam system politik lokal kampung. Masuknya pengaruh politik nasional ke dalam system politik kampung adalah bentuk lain intervensi negara yang pada dasarnya memperkuat struktur kekuasaan formal negara dalam masyarakat kampung. Realitas ini dibaca penghulu sebagai tantangan sekaligus peluang bagi kekuasaan penghulu di wilayahnya. Paling tidak pandangan ini sudah muncul sejak tahun 2002 ketika para penghulu masa kepemimpinan Abdullah Ayim berakhir dan pada saat itu diadakan pemilihan kepala desa (pada waktu itu sebutan kepala desa) secara demokratis, maka terpilihlah Bukri Aw sebagai kepala desa terpilih periode 2002-2007. Pada zaman rezim kepemimpinan Bukri masyarakat desa Dosan menerima program dari pemerintah Kabupaten. Siak berupa kebijakan perkebunan kelapa sawit yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat Dosan.

Dalam kondisi seperti inilah struktur sosial-politik masyarakat Dosan mulai terbelah, disatu sisi struktur politik kampung yang terbentuk melalui system kekerabatan mulai tegas ditinggalkan dan disisi lain struktur politik formal negara melalui Undang-

perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; (h) Mengembangkan sumber pendapatan Desa; (i) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; (j) Memanfaatkan teknologi tepat guna; (k) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara Partisipatif; (l) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan dan perundangan; dan (k) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Undang bersifat mengikat diberlakukan dominan. Dengan kata lain, sikap kompromi penghulu dalam mengambil keputusan kampung adalah bentuk lain adaptasi diri penghulu dalam konteks struktur yang berubah. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan informan bahwa setelah kami dilantik selanjutnya diadakan sosialisasi oleh pemerintah kabupaten Siak mengenai perubahan nama Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah kabupaten Siak mengeluarkan PERDA Kabupaten Siak Nomor.1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung. Sosialisasi ini memberikan informasi dan pengetahuan mengenai berbagai regulasi penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, menurut informan bahwa proses sosialisasi ini menanamkan nilai-nilai terkait tentang pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan Desa berdasarkan regulasi kehendak pemerintah Pusat-Daerah tersebut dapat diterima dengan baik⁸. Masih menurut informan bahwa sosialisasi ini memperkuat pengetahuan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang sudah diterima selama ini termasuk dalam mengelola konflik sosial.

2. Sikap Konservatif

Isu politik tentang akses terhadap SDA muncul ke permukaan setelah kebijakan desentralisasi dan OTDA diterapkan. Ini dimungkinkan karena sesudah 1999 berlaku kebijakan baru melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 terakhir Undang-Undang 32 tahun 2014, yang memberikan kebebasan Daerah untuk memanfaatkan SDA-nya. Pemberlakuan Undang-

undang otonomi Daerah (OTDA) ini memunculkan kembali pembicaraan mengenai kebijakan perkebunan kelapa sawit yang semula tidak bisa diungkapkan. Karena eforia OTDA, kebebasan, dan demokratisasi, kebijakan perkebunan kelapa sawit berkembang menjadi isu lokal dan bisa dipakai oleh aktor-aktor politik yang bergulat di Riau termasuk di kampung Dosan, Siak

Dengan kata lain, para penggerak reformasi dapat meyakinkan dan member harapan kepada para kaum konservatif, bahwa reformasi tidak mengancam mereka. Sebaliknya, membawa perubahan dengan cara yang smart. Crafting yang lebih seru akan terjadi ketika penggerak reformasi berhadapan dengan kaum radikal dan reaksioner, Penggerak reformasi akan memenangkan reformasi, sekaligus membuat reformasi tampil kokoh dan berkelanjutan, bila mampu membangun koalisi pendukung yang besar dan kuat, serta melakukan negosiasi secara smart dengan kaum reaksioner dan konservatif.⁹

Menurut penghulu kampung Dosan keberadaan sumberdaya alam dalam hal ini kelapa sawit, lahan adalah potensi yang harus dikembangkan pemerintah bersama masyarakat. SDA ini dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat setempat bekerjasama dengan pelaku bisnis dan dukungan Pemerintah kabupaten Siak.¹⁰ Pernyataan informan ini adalah bentuk manifestasi sikap elit yang konservatif. Sikap elit yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk merubah status

⁸ Wawancara dengan Penghulu kampung Dosan tanggal 25 Juni 2016 di Di kampung Dosan.

⁹ Eko, Sutoro. 2013. Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan. IRE Yogyakarta. Hal. 79-83

¹⁰ Wawancara dengan Penghulu Dosan tanggal 25 Juni 2016

sosialnya. Elit dengan tipe ini membuka peluang yang sama bagi anggota masyarakat yang bukan berasal dari kelompok elit untuk bersaing sehat bagi anggota-anggota masyarakatnya. Elit bersikap konservatif ini mempunyai daya tanggap yang tinggi terhadap aspirasi dan tuntutan masyarakat.¹¹ Responsivitas penghulu terhadap aspirasi dan tuntutan masyarakat ini nampak dari beberapa ilustrasi pembangunan yang terjadi di kampung Dosan berikut ini.

Di kampung Dosan seperti kampung-kampung lainnya di kabupaten Siak. Sejak pemerintahan kabupaten Siak mengeluarkan Program pembangunan kelapa sawit I yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak secara langsung berdampak terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Kampung Dosan dan pada akhirnya mewarnai persepsi penghulu terhadap kekuasaan. Secara structural, pembangunan perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan metode subsidi yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki lahan dengan yang tidak memiliki lahan.

Sementara itu di tingkat pemerintah Daerah Kabupaten Siak Kepala Bagian Pertanahan melakukan upaya pengelolaan konflik berdasarkan kepada berbagai peraturan perundangan yang ada. Menurut Pemkab bahwa konflik pertanahan di Kabupaten Siak memang didominasi oleh permasalahan perkebunan. Pemerintah Kabupaten Siak ikut serta dalam menyelesaikan konflik dibidang perkebunan tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (sekarang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Ada 9 (sembilan) sub urusan bidang pertanahan yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota yakni sebagai berikut: Izin lokasi, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Sengketa tanah garapan, Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, Subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*, Tanah ulayat, Tanah kosong, Izin membuka tanah, dan Penggunaan tanah.

Karena Kampung Dosan merupakan Kampung pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani¹², Penggunaan Tanah di Kampung Dosan sebagian besar di peruntukkan untuk tanah pertanian dan perkebunan sedangkan sisanya untuk Tanah Kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Secara garis besar perubahan pola kehidupan masyarakat di kecamatan pusako telah berubah dari daerah aliran sungai ke daratan dan dari bergantung kepada pekerjaan sebagai nelayan sekarang telah menjadi petani sawit. Namun akibat perubahan ini konflik lahan yang berbasis kebun kelapa sawit juga terjadi karena keterbatasan lahan yang diperebutkan oleh banyak orang. Keterbatasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit menyebabkan pertentangan antara kelompok masyarakat. Penghulu kampung melakukan koalisi serta melakukan negosiasi secara cerdas dengan kaum reaksioner dan konservatif dengan cara membangun kerjasama antar kelompok, antar kampung dan antar lembaga diberbagai ruang public dan waktu siang maupun malam.

¹¹ Haryanto, hal.33

¹² Data Profil kampung Dosan 2016: petani 221 KK, Nelayan 20 KK, Pedagang 30 KK, Buruh 30 KK, PNS 13 KK, dan Pegawai swasta 7 KK

3. Pasar Output Dan Pasar Konsumtif

Pada umumnya, mata pencaharian masyarakat kampung Dosan kebanyakan adalah petani sawit, menoreh Karet dan bekerja serabutan yaitu buruh tani, bangunan, nelayan, hal ini didukung kebiasaan nenek-moyang mereka bertani –ladang berpindah sehingga lahan mereka kebanyakan tidak produktif. Sementara untuk mengandalkan hasil tangkapan sebagai nelayan untuk masa sekarang sangat kurang menjamin, hal ini disebabkan menurunnya hasil tangkapan dari sungai Siak. Seperti penuturan beberapa orang warga bahwa untuk *melaut* kondisinya hasil yang diperoleh sangat memprihatinkan, terkadang mereka pulang dari *melaut* hanya memperoleh udang/ikan satu- dua ekor atau tidak memperoleh hasil sama sekali.

Untuk masyarakat yang berkebun karet dengan luas kebun rata-rata 0,5-2 Ha, maka kondisi ekonominya akan beragam sesuai dengan hasil dari luas kebunnya, dan sangat berpengaruh dengan musim. Kalau tidak dalam kondisi musim penghujan untuk 1 ha kebun karet mereka memperoleh Rp.150.000,-s/d Rp. 200.000,- seminggu dengan perolehan getah karet 30-35 Kg. Jumlah pendapatan ini jika dikeluarkan dengan keperluan utama mereka setiap minggu seringkali kekurangan apalagi dengan jumlah tanggungan yang cukup besar dalam satu keluarga tersebut. Hal ini mendorong mereka mencari pengahasilan tambahn menjadi buruh bangunan atau *melaut* mencari ikan untuk lauk pauk, beruntung bila hasil tangkapannya bisa untuk dijual.

Menurut penghulu kampung Dosan keberadaan sumberdaya alam dalam hal ini kelapa sawit, lahan adalah potensi yang harus dikembangkan pemerintah bersama masyarakat. SDA

ini dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat setempat bekerjasama dengan pelaku bisnis dan dukungan Pemerintah kabupaten Siak.¹³ Pernyataan informan ini adalah bentuk manifestasi sikap elit yang konformis. Sikap elit yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk merubah status sosialnya. Elit dengan tipe ini membuka peluang yang sama bagi anggota masyarakat yang bukan berasal dari kelompok elit untuk bersaing sehat bagi anggota-anggota masyarakatnya. Elit bertipe ini mempunyai daya tanggap yang tinggi terhadap aspirasi dan tuntutan masyarakat.¹⁴ Responsivitas penghulu terhadap aspirasi dan tuntutan masyarakat ini berimplikasi kepada strategi negosiasi dan toleransi penghulu dalam mengelola konflik pembangunan.

B. Metode Pengelolaan Konflik

Secara struktural, Kepala Daerah diamanatkan untuk mencegah, menghentikan, serta memulihkan konflik sosial sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Konflik yang terjadi di daerah aliran sungai Kabupaten Siak khususnya di kampung Dosan. Kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Siak. Konflik pertanahan yang ada di Kabupaten Siak direspon oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak diupayakan untuk diselesaikan dengan terlebih dahulu melakukan inventarisasi/penelitian/kajian serta diteruskan kepada instansi yang

¹³ Wawancara dengan Penghulu Dosan tanggal 25 Juni 2016

¹⁴ Haryanto, hal.33

berwenang menyelesaikan konflik tersebut. Konflik pertanahan yang terjadi diselesaikan sehingga tidak meningkat ekskalasinya menjadi konflik sosial.

Pemerintahan desa dan masyarakat lebih memilih menyelesaikan konflik ada yang meminta solusi kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak dan ada pula penghulu memiliki inisiatif membantu menyelesaikan konflik dengan cara mengintegrasikan proses hukum dan musyawarah yang berlandaskan pada kearifan lokal. Kenyataan ini terungkap seperti yang disampaikan oleh informan bahwa anggapan bahwa proses hukum kurang memenuhi rasa keadilan para pihak karena pengambilan keputusannya mengedepankan proses salah atau benar dan menang atau kalah. Penilaian

seperti ini akan berimbang apabila apabila secara intuitif maupun secara sosial para pihak dilibatkan dalam proses penanganan konflik.

V. PENUTUP

Sikap toleransi pemimpin menentukan dinamika wacana isu dan masalah sosial yang muncul dan dimunculkan oleh aktor yang efektif menanamkan pengaruh politik dalam membuat keputusan. Kondisi ini banyak menanamkan pengaruh kepada penerimaan, pemahaman dan penilaian dalam mengelola konflik kekuasaan era desentralisasi. Kendali terhadap para aktor yang memiliki pengaruh toleransi inilah yang menjadi strategi terobosan dalam proses pembangunan politik lokal di Riau kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khairul. Isril, dan Asrida, W. 2015. *Political Model of Conflict Based on palm Plantation near to Riverside area: Dosan Siak case, 2009-2014* dalam prosiding. Seminar Antar bangsa ke-8 Ekologi manusia dan Perubahan Persekitaran, Langkawi, Kedah Malaysia
- Bates, H. Robert. 1981. *Markets and States in Tropical Africa, The political Basis Agricultural Policies*, California: University of California Press.
- Bahari, S. 1996. Konflik Agraria DI Wilayah Perkebunan: Rantai Sejarah Yang Tak Berujung” dalam *Jurnal Analisis Sosial* Vol.9, No.1 April 2004.
- Casson, Anne. 2000. *The Hesitant Boom: Indonesia's Oil Palm Subsektor in an Era of Economic Crisis and Political Change*, [HTTP/w.wOccasional paper no.29](http://www.Occasional paper no.29).
- Eko, Sutoro. 2013. *Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan*. Yogyakarta. IRE
- Kurniawan, R. 2007. *Program Sawit Rakyat, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau*, Pekanbaru
- Liddle, William. 2008. *Keberhasilan Demokrasi. Keberhasilan Demokrasi*. The Ohio State University, Columbus, Ohio, AS.
- MacIntyre, A. 1991. *Business and Politics In Indonesia*. Asian Studies Association of Australia in Association with Allen & Unwin. Sidney
- Klinken, Gerry Van (2007) *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*, Simultaneously published in the USA and Canada.
- Sunyoto Usman. 2015. *Esai-Esai Perubahan Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Yin. K. Robert (2004) *Case Study Research, Design and Methode*, California. Sage Publications, Inc.